

**PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam ilmu Hukum

oleh:

**WAHYUNING THYAS ANDAYANI**

NIM.0810110065



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN

DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

WAHYUNING THYAS ANDAYANI

NIM. 0810110065

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

SUMIYANTO, Dr, S.H, M,H

NIP. 19521215 198003 1 002

BAMBANG SUDJITO, S.H, M.Hum

NIP. 19520605 198003 1 006

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

ENY HARJATI, S.H, M.Hum

NIP: 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN

DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun oleh :

WAHYUNING THYAS ANDAYANI

NIM. 0810110065

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sumiyanto, Dr, S.H, M,H

Bambang Sudjito, S.H, M.Hum

NIP. 19521215 198003 1 002

NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumiyanto, Dr, S.H, M,H

Eny Harjati, S.H, M.Hum

NIP. 19521215 198003 1 002

NIP:19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya haturkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti serta kemudahan dalam segala urusan sehingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada program studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Sihabudin, Dr. SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Eny Harjati, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah membantu menyelesaikan penulisan hukum ini sampai selesai.
4. Bapak Faidzin SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberi masukan kepada penulis.
5. Bapak Sumiyanto Dr. SH.MH selaku pembimbing skripsi utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Bambang Sujidto, SH. M.Hum selaku pembimbing skripsi pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, dan pengetahuan, serta motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tersayang, atas Do'a, cinta, kasih sayang, ketulusan dan kesabaran serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Keluarga Besar tercinta, atas motivasi dan semangat serta do'a yang di berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan krik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Februari 20012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTARTABEL.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Sistematika penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian umum tentang tindak pidana.....	16
B. Kajian umum tentang tindak pidana korupsi.....	18
C. Kajian umum tentang penyidikan.....	22
D. Kajian umum tentang penyidikan oleh kepolisian.....	26
E. Kajian umum tentang penyidikan oleh kejaksaan.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	31
B. Jenis dan sumber bahan hukum.....	32
C. Teknik memperoleh bahan hukum.....	33
D. Teknik analisis bahan hukum.....	33
E. Definisi Konseptual.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi.....	36



B. Implementasi kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi .....	47
b.1. Implementasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi.....	46
b.2. Implementasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.....	51
C. Perbandingan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

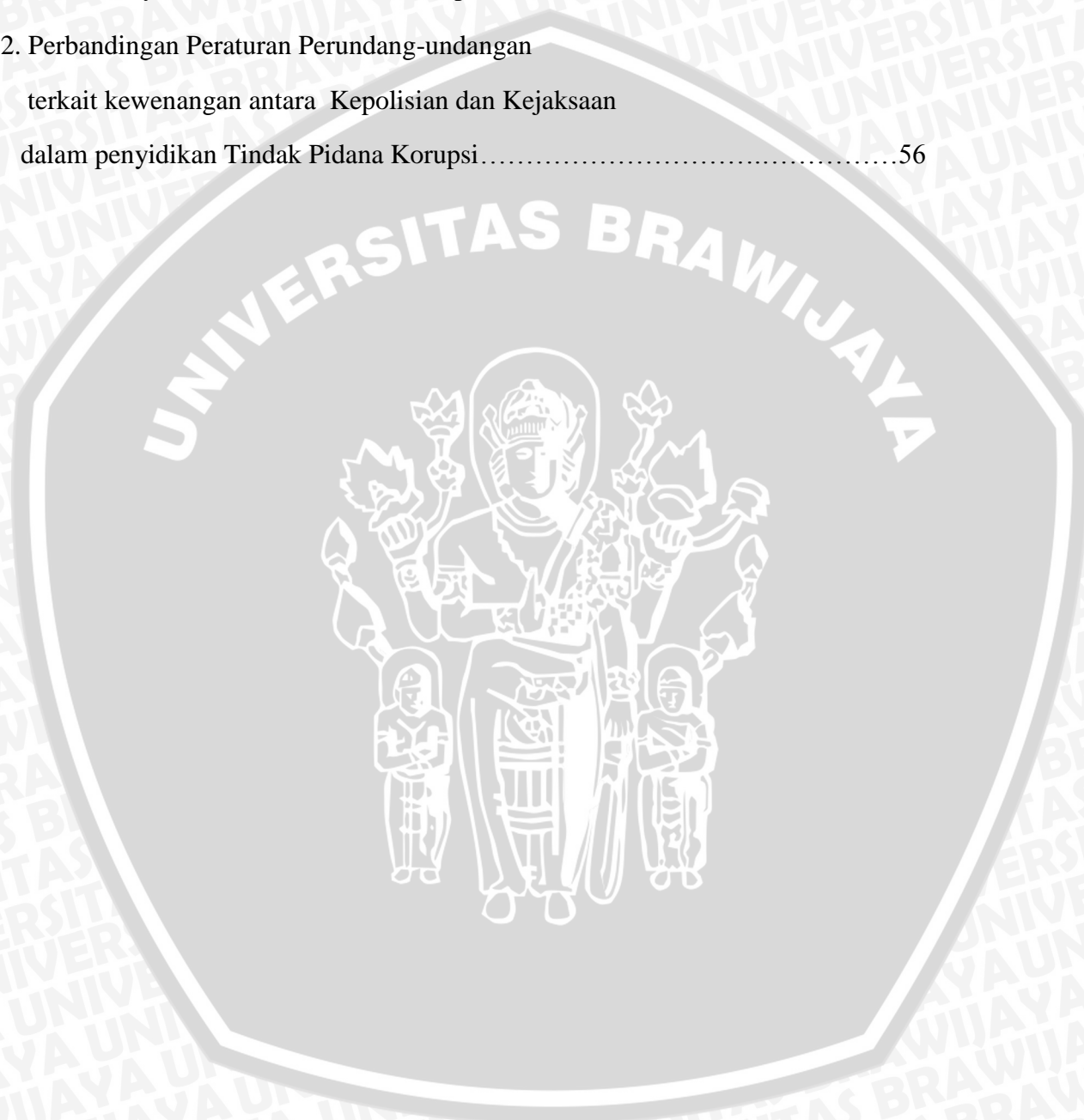
## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	55
Tabel 2. Perbandingan Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	56





## ABSTRAKSI

WAHYUNING THYAS ANDAYANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012. *Problematika Ketentuan Hukum Kewenangan Polri dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Sumiyanto dr. S.H.M.H , Bambang Sudjito S.H. M.hum.

Dalam Penelitian skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini dilatar belakangi dengan perkembangan korupsi terus meningkat. Maka diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari beberapa undang-undang yang terkait mengenai tindak pidana korupsi tersebut normanya tidak tegas, memberi kesan kewenangan penyidikan korupsi tumpang tindih. Pada satu sisi pemberian wewenang penyidikan kepada berbagai instansi penegak hukum merupakan perwujudan kesungguhan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, warna-warni lembaga penyidik dapat menimbulkan kebingungan para pencari keadilan dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum penyidikan. Timbulnya persaingan dalam menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak terjadi apabila lembaga tersebut memahami kinerjanya masing. Hal ini justru menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum terhadap korupsi serta adanya ketegasan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut yang memenuhi asas-asas perundangan baik berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Dalam hal ini Penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut :1.Bagaimana implentasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana perbandingan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari bahan hukum yang terkumpul dengan didukung teori yang ada. Berdasarkan Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Kejaksaan, dua lembaga tersebut mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana khusus, peraturan tersebut mengatur hal yang sama maka digunakan asas perundang-undangan *Lex posteriore derogat lex priori* yaitu Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa, apabila ada 2 buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan benturan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada Polisi dan Jaksa, maka diperlukanya pembaharuan untuk sinkronisasi antara Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No Undang-undangan No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-undangan No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kata kunci: Penyidikan, Kepolisian, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Problematika.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan suatu masalah yang senantiasa melanda kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Mulai dari korupsi yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hingga pejabat ataupun mantan pejabat ditingkat pusat maupun daerah.<sup>1</sup>

Faktor utama pendorong orang melakukan korupsi karena adanya kondisi peluang terbuka yang di dukung oleh keinginan kuat untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi selalu ada. Kesempatan ini terjadi karena sistem birokrasi yang ada selalu tidak transparan dalam melakukan proses penyelenggara pemerintah.<sup>2</sup>

Perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga memerlukan penanganan dan upaya yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measure*) dalam pemberantasannya. Pada mulanya istilah *Extra Ordinary Crime* digunakan untuk menyebut kejahatan luar biasa seperti terorisme, genosida dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia(HAM).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sakti Nurdaya, *Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, makalah disajikan dalam perkuliahan kapita selekta hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2007, Hal 2.

<sup>2</sup> Mukhtie Fadjar, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Pedoman penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, hal 6.

<sup>3</sup> Jenti Oktavia Simanjutak, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Serta kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PKP) Berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas*



Korupsi dikatakan sebagai *extraordinary* karena korupsi merugikan keuangan negara/perekonomian, menghambat pembangunan dan pertumbuhan nasional menuntut efisiensi tinggi. Korupsi meluas dan sistematis merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara biasa. Akibatnya, tidak hanya kerugian negara tetapi merusak moral dan karakter bangsa tetapi juga sendi-sendi kehidupan sehingga tidak bersikap disiplin, malas, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, mudah menyerah, tidak proaktif, tidak percaya diri, dan tidak memiliki semangat berjuang untuk mandiri, sebaliknya mudah menyerah serta mencari jalan pintas dan Perkembangannya sangat meluas dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Korupsi ini Merupakan salah satu bentuk penghancuran secara sistematis dan merompak-prandakan harkat dan martabat dan lebih dari itu akibat daripada korupsi yang telah terstruktur dan membudaya tidak menutup kemungkinan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir, begitu mengakar, membudaya dan sistematis.<sup>5</sup>

Masalah korupsi dapat dikatakan sebagai masalah utama di Indonesia, karena hampir tidak ada sektor di masyarakat yang bebas dari korupsi. Korupsi tertanam secara mendalam di lapisan masyarakat dan berbagai institusi, baik masyarakat sipil, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), birokrasi, partai politik, bahkan institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>6</sup>

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represhif. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana

---

*Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, Hal 18.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 18.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal, 19.

<sup>6</sup> Soren Davidsen, et all, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, USINDO, Jakarta, 2007, hal 13.



khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001. Terdapat dua alasan Undang-undang No 30 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan. *Pertama*, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. *Kedua*, jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk diwujudkan.<sup>7</sup>

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus.<sup>8</sup> Berdasar pendapat tersebut maka pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah *lex specialis derogat lex generalis*. Ketentuan hukum pidana khusus menyimpangkan ketentuan hukum pidana umum.

Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain :

1. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28).
2. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
3. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2011, hal 29.

<sup>8</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Umbara, Bandung, 1981, hal 61.

Adanya penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum salah satu dasar pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat diketahui bahwa pada dasarnya melibatkan seluruh Warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Peranan dan strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memaksimalkan peran penegak hukum pemberantas korupsi. Di antara kebijakan-kebijakan pemerintah yang umum itu yakni pertama, *memilih pegawai*, lazimnya kita membayangkan tugas memilih pegawai sebagai menemukan orang-orang yang secara teknis paling mampu untuk pekerjaan yang dihadapi. Kedua, *mengubah imbalan dan hukuman*, alasannya membuat para pegawai lebih tertarik bertindak produktif untuk melawan korupsi dan kurang tertarik terlibat dalam perilaku yang tidak halal. Ketiga, *mengumpulkan informasi*, atasan mempunyai informasi tentang apa yang dilakukan pegawai dan klien, dia barangkali mampu mencegah korupsi dengan meningkatkan suasana bahwa korupsi akan dideteksi dan dihukum. Keempat, *mencoba untuk mengurangi peluang korupsi melalui perubahan organisasi*, tujuannya adalah menghindari situasi dimana seorang pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit

---

<sup>9</sup>Sakti Nurdaya, *Op.Cit* , Hal 11.



kemungkinan pertanggungjawaban. Kelima, mengubah sikap terhadap korupsi dengan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi sikap agar tidak berbuat korupsi.<sup>10</sup>

Berikut ini contoh kasus Kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan data tahun 2007, Polri mengajukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 204.883 kasus, namun berkas perkara tahap I yang diserahkan ke kejaksaan hanya 127.335 perkara, diterbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) sebanyak 104.4448 perkara dan yang ditindaklanjuti ke pelimpahan berkas tahap II, artinya diserahkan ke penuntutan hanya 95.735 perkara. Berdasarkan data ini berarti terdapat ratusan ribu perkara yang dinyatakan P21, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan tahap II oleh penyidik. Sedangkan penyidikan yang berhasil dituntaskan kejaksaan (1.117 kasus). Upaya pemberantasan korupsi oleh berbagai instansi sebagai satu bentuk mekanisme (check and balance). Dengan demikian jika ada instansi yang tidak menindaklanjuti satu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan penyidikan oleh instansi lain sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen.<sup>11</sup>

Perkembangan kasus dugaan korupsi paling mencolok, 4 kasus dugaan korupsi yang melibatkan tokoh besar belum juga ada titik terang. Sementara nilai korupsinya diperkirakan mencapai Rp 332,84 miliar. Empat kasus tersebut, dua diantaranya dalam penanganan dan pengawasan Polda Jatim. Yakni, dugaan korupsi proyek Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri Rp 300 miliar yang disinyalir melibatkan mantan Bupati Ir Sutrisno. Kasus ini ditangani Pidkor Polda Jatim. Kasus selanjutnya mengenai dugaan korupsi proyek pintu gerbang (tollgate) Bandara Juanda Rp 4,1 miliar, yang ditangani Polrestabes Surabaya. Sedangkan dua kasus lainnya ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kejati sampai saat ini masih belum mampu menangkap Rini Sukriswati, mantan pejabat di Dinas Perkebunan Pemrov Jatim yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) alias buron oleh Kejaksaan. Dia juga telah

---

<sup>10</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Obor Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 98-119.

<sup>11</sup> Anonymous, 2011, *Jaksa Sidik Korupsi Tak Bertentangan UUD 1945*, (online), <http://www.PolitikIndonesia.com> (12 Oktober 2011).



ditetapkan menjadi tersangka dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Rp 28 miliar bersama pimpinan dan bendara kelompok usaha bersama (KUB) Rosan Kencana, rekanan Dinas Perkebunan. Kasus lainnya adalah penyelidikan kasus di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang sudah berjalan lebih dari tiga bulan, namun belum ada hasil. Kasus tersebut diduga melibatkan Haruna Soemitro, mantan Ketua Pengprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jatim, diduga membuat laporan fiktif. Laporan tersebut terkait dengan biaya penginapan 93 orang tim sepak bola di Unit Diklat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya mulai 25 Pebruari hingga 10 Maret 2010. Penginapan yang diatasnamakan Pengprov PSSI Jatim ini menelan anggaran Rp45.570.000. Selain itu, juga ada dugaan pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif ke pusat pelatihan daerah (Puslatda). Dalam laporan yang dibuat untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012 totalnya mencapai Rp 408. 540.000, untuk periode Pebruari hingga Juli 2010. Rinciannya, dana yang dikeluarkan pada bulan Pebruari sejumlah Rp175 juta. Lalu Maret sebesar 159 juta. Sedangkan mulai April hingga Juli tidak ada kejelasan kegunaannya. Jika ditotal nilai empat kasus tersebut sekitar Rp 332,84 miliar. Tentu saja nilai tersebut cukup fantastis untuk skala regional Jawa Timur.<sup>12</sup>

Selain itu kasus berikut terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara wewenang Kepolisian dan Kejaksaan selaku Penyidik dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan sama-sama tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kesehatan terkait proyek pengadaan alat bantu belajar-mengajar pendidikan dokter di rumah sakit dengan tersangka yang sama. Bedanya polisi menyidik proyek tahun anggaran 2009, sedangkan Kejaksaan menyidik proyek untuk tahun anggaran 2010.

Anggota komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Rabu (16/11), di Jakarta, mengatakan, penyidikan perkara yang sama tidak boleh dilakukan oleh dua institusi penegak hukum. “Hal

---

12 Anonymous, 2011, *Korupsi Rp 332,84 M di Polda dan Kejati Misterius (online)*, <http://mbayuisa.blogspot.com/2011/04/korupsi-rp-33284-m-di-polda-dan-kejati.html>.(25 November 2011).

itu tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan aturan, kewenangan pemeriksaan terhadap seorang tersangka dengan kasus yang sama hanya boleh dilakukan oleh satu instansi penegak hukum”.

Saat ini, Kejaksaan menyidik kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat bantu belajar-mengajar pendidikan dokter tahun anggaran 2010 senilai Rp. 417,7 M. terhadap kasus ini, Kejaksaan menetapkan tiga tersangka, yakni Widiyanto Aim selaku ketua panitia pengadaan proyek, Syamsul Bahri selaku pejabat pembuat komitmen, dan Bantu Marpaung selaku Direktur Utama PT Buana Ramosari Gemilang. Mereka diduga mengelembungkan dana dan mengubah spesifikasi alat sehingga tidak sesuai kontrak dan tidak profesional. Bareskrim Polri juga tengah menyidik dugaan korupsi pada proyek yang sama tetapi pada tahun anggaran yang berbeda, yakni 2009. Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan Syamsul Bahri sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Noor Rachmad mengatakan, perbedaan perkara yang disidik Kejaksaan dan Polisi adalah disik kejaksaan dan polisi adalah pada tahun anggarannya. Ditanya apakah penanganan kedua perkara bisa digabungkan mengingat hanya tahun anggarannya yang berbeda, semenara proyek, modus, oknumnya sama, Noor Rachmad mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu hasil penyidikan dari polisi setelah itu, baru kita lihat bagaimana hasil penyidikan kedua perkara itu.<sup>13</sup>

Kondisi inilah yang menjadi fokus kalangan, baik masyarakat ataupun pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dari perspektif penegakkan hukum (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) dan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sudah selayaknya apabila penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui jalur pidana menjadi alternative terakhir (*ultimum remedium*). Asas *ultimum remedium* sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup mengatasinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kementerian Kesehatan, Kamis 17 November 2011, *Polisi dan Kejaksaan Sidik Kasus yang Sama*, Kompas, hal 3.

<sup>14</sup> Mahfud M.D, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Moh Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, Hal 149.



Mengingat peran dari Polisi yang pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi kepolisian selain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 2 dan pasal 4 mengingat peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggungjawab khusus menjalankan peranannya agar terpelihara ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polisi sebagai salah satu sub system dari system peradilan pidana, berwenang melakukan tugas yaitu penyelidikan dan, penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus korupsi.<sup>16</sup>

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Polisi dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi senantiasa berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang.<sup>17</sup>

Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengenai Penanganan tindak pidana korupsi oleh Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Perannya dalam pemberantasan korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan secara non hukum pidana.<sup>18</sup>

Demikian peranan Polisi dan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun dalam pelaksanaannya sering kali masih terjadi tindak pidana korupsi disekitar kita. Dari beberapa undang-undang diatas yang terkait mengenai tindak pidana korupsi tersebut

---

<sup>15</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 163.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 163.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 163.

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal 3.



memberi kesan kewenangan penyidikan korupsi tumpang tindih. Pada satu sisi pemberian wewenang penyidikan kepada berbagai instansi penegak hukum merupakan perwujudan kesungguhan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, warna-warni lembaga penyidik dapat menimbulkan kebingungan para pencari keadilan dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum penyidikan.<sup>19</sup>

Benturan dan tumpang tindih kewenangan diantara dua lembaga (dualisme) tersebut hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya asas-asas pembentukan perundangan, peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa, apabila ada 2 buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (*Lex posteriore derogat lex priori*). Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Timbulnya persaingan dalam menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak terjadi apabila lembaga tersebut memahami kinerjanya masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk mendukung dan saling membantu keberhasilan penyidikan tindak pidana korupsi serta memaksimalkan semua lembaga penegak hukum. Maka diperlukan adanya kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian agar kedua lembaga tersebut efisien selain itu penegak hukum harus memiliki suatu *balance and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini justru menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum terhadap korupsi serta adanya ketegasan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut yang memenuhi asas-asas

---

<sup>19</sup> Selamat Sabagariang, *Dilema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Forum Hukum Akademika, Jambi, 2008, Hal 40.

repository.ub.ac.id

perundangan baik berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan berbagai instansi/pejabat perlu ada kejelasan mengenai batas-batas wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencegah perbenturan, duplikasi dan kekosongan sehingga dapat diketahui dalam hal apa dan dengan siapa saja suatu instansi/pejabat harus berhubungan.<sup>22</sup>

Maka dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implentasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perbandingan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implentasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Sistem Administrasi Negara RI*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal 9.

<sup>21</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*. UII Press, Yogyakarta 2008. Hal 95.



2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman yang lebih mendalam dan kritis berlakunya ketentuan hukum positif yang berlaku dan diharapkan sebagai wacana tentang norma-norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai studi komparatif kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan sebagai bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana korupsi serta sumbangsih perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi :

###### a. Bagi penulis

1. Agar penulis memiliki wawasan luas, kritis, cerdas dan kreatif dalam menanggapi persoalan-persoalan sosial masyarakat Indonesia, khususnya masalah yang terkait dengan korupsi.
2. Penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan strata 1 (satu) dalam bidang hukum.

---

<sup>22</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Op.Cit.* hal 2.



b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan kedepan kepada masyarakat, agar bisa dan berani menindak apabila terjadi korupsi terhadap mereka ataupun orang disekitar mereka, serta memberi informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai korupsi sehingga masyarakat sadar tidak melakukan korupsi.

c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Agar dapat mengetahui mengenai studi komparatif kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

d. Bagi Aparat Penegak hukum

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan korupsi dan perundangan lainnya yang relevan.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diambil dari studi kepustakaan.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, Jenis sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi

konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai apa yang diteliti.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan yang diteliti disertai dengan pemaparan hasil penelitian terhadap bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### F. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belandanya *strafbaarfiet*.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah: Peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum dan delik.<sup>23</sup>

Moelyatno menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai:

1. Perbuatan manusia,
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan Undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari azas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil dan merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana<sup>24</sup>

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana, demikian pendapat Moelyatno. Sifat melawan hukum merupakan ciri khas perbuatan yang diancam pidana. Sifat melawan hukum merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan. Mengenai pengertian sifat melawan hukum ada dua pandangan, yaitu sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil yaitu perbuatan sifat melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum

---

<sup>23</sup> Maruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal 21.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 22.

tidak tertulis atau norma-norma yang ada di masyarakat.<sup>25</sup>

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>26</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur tambahan untuk Memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan dapatnya pidana;
9. Unsur obyek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut Sudarto, ilmu hukum pidana terdapat istilah, meliputi :

- a. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, berdasarkan Undang-undang pidana dan peraturan hukum pidana yang ada dalam undang-undang khusus,
- b. Hukum pidana khusus,
- c. Undang-undang pidana khusus.<sup>27</sup>

#### G. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat di jumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “ korupsi” (dari bahasa Latin : *Corruptio*= penyuapan; *Corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 36.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Hukum Acara Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta. 2008, hal 83.

<sup>27</sup> Sudarto, *Op.Cit.* hal 58

<sup>28</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2008, Hal.8,



Adapun secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi : Busuk, rusak, suka memakai barang, atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat digosok ( melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).<sup>29</sup>

Sudarto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan “perbuatan memperkaya” artinya perbuatan apa saja.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum “melawan hukum” diartikan secara formil dan materiel, unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Perbuatan itu diketahui dan patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sifat korupsi menurut Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi yang bermotif terselubung, yaitu korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
2. Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* , hal 9

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 18

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 10

Ciri-ciri korupsi menurut Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

Beberapa faktor timbulnya tindak pidana korupsi, antara lain:<sup>33</sup>

1. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
2. Tidak adanya suatu system pemerintahan yang transparan ;
3. Faktor ekonomi (dibeberapa Negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi budaya);
4. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien dan
5. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Umunya tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tindak pidana korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang berbuat tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.<sup>34</sup>

Subyek hukum tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-undang No 31 Tahun 1991 jo UU No 20 Tahun 2001 yang menjadi subyek hukum tipikor adalah korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang atau korporasi.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipermasalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan didalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara kaku,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.15.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.15.



tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 tahun 1991 jo UU No 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah setiap orang, termasuk korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tindak pidana mengalami perluasan perumusan delik. Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum sebagai delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu tipikor sebagai delik formal dan material. Sebagai delik formal suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi, meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi jika perbuatan itu telah dapat di kategorikan akan menimbulkan kerugian Negara, pelakunya sudah dapat di hukum. Begitupun halnya dalam hal hasil tipikor telah dikembalikan kepada Negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sedangkan sifat melawan hukum formal dan materiil menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.<sup>35</sup>

Demikian seseorang hanya dapat dipermasalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana.

---

<sup>35</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit.* Hal 145

## H. KAJIAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa dan meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan “el” hanya memperkeras (banyak) menyidik.<sup>36</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka Cetakan kedua tahun 1989 Halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 butir (5) memberi definisi penyelidikan sebagai: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Jadi berarti penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidik, tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran<sup>37</sup>

Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara RI
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 119.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 119.



Selanjutnya dalam pasal 3 PP No 27 Tahun 1983 diatur pula tentang pejabat penyidik pembantu sebagai berikut:

1. Penyidik pembantu adalah:
  - a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a) atau yang dinamakan dengan itu.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Wewenang penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian RI sesuai dengan Perarutan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsoring* (belanda) dan *investigation* (inggris) atau penyisatan/siasat (malaysia). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 butir (2) memberi definisi sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsoring*. Menurut De Pinto menyidik berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.<sup>38</sup>

Dari rumusan pasal 1 angka 2 dapat dirinci unsur-unsur pengertian penyidikan itu sebagai berikut:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalnya kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik yang didahului oleh membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.
- b. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh pasal angka 1 definisikan sebagai “ pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut Undang-undang.
- d. Tujuan dari penyidikan ialah (1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan (2) menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan akhir penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.<sup>39</sup>

Dari unsur keempat dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaan penyelidikan.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut

:

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal 119.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, Hal .381.



2. Ketentuan tentang alat- alat penyidik;
3. Ketentuan tentang di ketahui terjadinya delik;
4. Pemeriksaan di tempat kejadian;
5. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
6. Penahanan sementara;
7. Pengeledahan;
8. Pemeriksaan atau interogasi;
9. Berita acara ( pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
10. Penyitaan;
11. Penyampungan perkara dan
12. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>40</sup>

## I. KAJIAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) polisi mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan wewenang penyidik pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dalam KUHAP pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa : penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pasal 13 disebutkan ada 3 tugas pokok Polri yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal 120-121.

<sup>41</sup> Kepolisian Negara RI, *Pengertian Kepolisian (online)*, <http://www.polri.go.id/> telah diakses sebanyak 3213010 kali (25 November 2011).

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi kepolisian selain diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Menginstruksikan (kepala) Kepolisian Negara RI untuk :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara,
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalagunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI dalam rangka penegakan hukum,
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan RI dan analisa transaksi keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengambilan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ini, memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan oleh Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi dua tindakan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh kepolisian asal substansi pasal 11 Undang-undang NO 30 Tahun 2002 Tentang KPK tidak dilanggar. Kepolisian memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi jika (a) tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara; (b) perkara korupsi tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

(c) tidak menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 163.

<sup>43</sup>*Ibid*, hal 165-166.



## J. KAJIAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>44</sup>

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Dalam pasal 30 Undang-undang No16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI menjelaskan :

- (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Melakukan penuntutan
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan Agama dan

---

<sup>44</sup> Kejaksaan RI, *Pengertian Kejaksaan (online)*, <http://www.kejaksaan.go.id> (25 November 2011).

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Selain itu dengan adanya ketentuan dalam PP Nomor 27 tahun 1983 yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka jaksa berwenang melakukan penyidikan setiap tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus acara pidana terlepas dalam Undang-undang yang bersangkutan, jaksa ditetapkan berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindakan pidana tersebut. Misalnya dalam tindak pidana korupsi ( UU No 31 Tahun 1999 jo 21 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi).

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Menginstruksikan (kepala) Kejaksaan Negara RI untuk :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>46</sup>



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.<sup>47</sup>

##### A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>48</sup> Penulis kemudian akan mengkaji sistematika hukum, mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang Problematika terkait kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Johnny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Ibid, *Pengertian Kejaksaan (online)*, <http://www.kejaksaan.go.id> (25 November 2011).

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 168.

<sup>47</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Pedoman Penulisan*, Malang, 2008, hal 12.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35.

## B. Jenis dan sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat kedalam meliputi:<sup>50</sup>
  - a) UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
  - b) - Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c) Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI pasal 2, 4, 14 ayat (1) huruf g serta Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (1) huruf d;
  - e) Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - f) Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan 6.
  - g) Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari studi pustaka, buku literatur, penjelasan Undang-undang, dokumen, dan pendapat pakar serta artikel untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya yang melengkai bahan hukum primer yang digunakan untuk memperjelas konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.<sup>51</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.

<sup>49</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248.

<sup>50</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hal 31.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 31.



### C. Teknik memperoleh bahan hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun internasional dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, Bahan hukum primer ini diperoleh dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum maupun diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan umum kota Malang. Adapun teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *parhaphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya.<sup>52</sup> Selain itu penulis memakai teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

### D. Teknik analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis.

Menurut P.W.C. Akkerman seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud, interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan antara aturan dalam suatu Undang-undang yang saling bergantung.<sup>53</sup> Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi sistematis, PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI pasal 2, 4, 14 ayat (1) huruf g; Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Undang-

undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (1) huruf d perlu ditelaah, dan UU No 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menguraikan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya serta saling mengkaitkan pasal demi pasal sehingga muncul suatu pasal ketentuan kewenangan penyidikan korupsi oleh Polri dan Kejaksaan.

Serta interprestasi Komparatif, cara penafsiran dengan membandingkan. Inteprestasi ini perlu digunakan, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan.

E. Definisi Konseptual

2. Tindak pidana adalah menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. Tindak pidana korupsi adalah diambil dari bahasa latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corrumpere* adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.
4. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
7. Problematika adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
8. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang berakibat h

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal 33.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### D. PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam pada periode 1941-1971, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan (termasuk di dalamnya perkara tindak pidana korupsi atau sejenisnya). Berdasarkan HIR, Kejaksaan mempunyai wewenang penyidikan lanjutan dan sekaligus berwenang melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan, bahkan berfungsi sebagai koordinator penyidik.

Pasal 38 ayat (1) HIR menyatakan;

“Urusan melakukan polisi justisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubungan dengan itu diperintahkan kepadanya oleh kepala kejaksaan pada pengadilan tinggi atau oleh jaksa agung”

Pasal 38 ayat (2) menyatakan :

“Dengan tidak mengurangi peraturan dalam ayat yang lalu dan dengan memperhatikan pekerjaan dan urusan yang lebih khusus diwajibkan kepada mereka itu masing-masing berhubungan khusus diwajibkan kepada mereka itu masing-masing berhubungan dengan itu, maka jaksa-jaksa pada pengadilan negeri menjalankan pekerjaannya di bawah pimpinan dan dengan mengingat perintah kepala kejaksaan”

Menurut Pasal 39 HIR, Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyidik antara lain: “Kepala desa serta pegawai polisi desa; kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (Asisten wedana atau camat) juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya; pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara); jaksa dan pengadilan negeri; mereka yang dengan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu; dan Pegawai polisi yang tidak digaji.”

---

<sup>53</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 112.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang menyatakan “Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara”, maka Kejaksaan masih berfungsi sebagai koordinator penyidik.

Dalam peraturan perundang-undangan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 25: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara tindak pidana lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26 : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang”.

Hukum acara pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pada prinsipnya tidak memberi wewenang penyidikan kepada kejaksaan, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana di atur dalam pasal 27 dan pasal 39.

Pasal 27 yang menentukan : “Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

Pasal 27 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tidak berkehendak memberi wewenang penyidikan kepada Kejaksaan, hanya saja dalam hal tertentu dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2002.



Pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :

“Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pasal 1 butir 5 Penyelidikan dalam KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai:

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Jadi berarti penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan, tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.<sup>54</sup> Penyelidikan ini dilakukan oleh Polisi dengan istilah *recherche*.

Berbeda dengan tindak pidana umum, data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan. Tindak pidana korupsi data awal diperoleh, antara lain dari:

- Menteri/Irjen/Banwasda/Irwilprop
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit BPK
- Aparat Intelijen.<sup>55</sup>

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 119.

<sup>55</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, Hal.20.

Dari rumusan pasal 1 butir 2 dapat dirinci unsur-unsur pengertian penyidikan itu sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalnya kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik yang didahului oleh membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.
2. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh pasal angka 1 definisikan sebagai “ pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut Undang-undang.
4. Tujuan dari penyidikan ialah (1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan (2) menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan akhir penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.<sup>56</sup>

Dari unsur keempat dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaan penyelidikan.

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

“ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal .381.



Sesuai dengan ketentuan KUHAP, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), dan pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim. Sehingga mempunyai kejelasan fungsi dan wewenang masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengenai tugas dan wewenang Polisi.

Tugas dan kewenangan Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.

Pada Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan wewenang polisi pada pasal 13.

“ Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara RI Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI dibidang proses pidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sedangkan dalam pasal dalam pasal 16 angka (1) berbunyi:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang -\ undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIMTAS TIPIKOR) yang terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan.



repository.ub.ac.id

Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Tim Tastipikor bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi pidana korupsi dan Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas.<sup>57</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor berwenang :

- a. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Selain peraturan-peraturan di atas dalam Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di instruksikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

Sesuai poin ke 9 Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.

---

<sup>57</sup> Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi (online)*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820>. (25 November 2011)

<sup>58</sup> *Ibid*, Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi (online)*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820>. (25 November 2011)

- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sesuai poin ke 10 Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan RI dan analisa transaksi keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengambilan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007 mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Rangkuman Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007:<sup>59</sup>

1. Mengenai penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon, dimana penyidik dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan secara berturut-turut, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut memang dapat dilakukan. Memang didalam KUHAP telah dilakukan suatu diferensi atas wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Diferensi wewenang tersebut dimaksudkan aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian diharapkan di suatu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, disisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka). Sementara itu, dalam suatu system, walaupun setiap komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan system secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.
2. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kewenangan Polri diatur dalam pasal 30 ayat (4) yang berbunyi “ Kepolisian Negara RI sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dari ketentuan pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tidak terdapat keentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa : “ susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara RI didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-undang No 2 tahun 2002, yang dalam pasal 14 dinyatakan, “ Dalam melaksanakan

<sup>59</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007.



- tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara RI bertugas... g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya dan pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan, :Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.
3. Dengan demikian, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-undang. Kata “ Sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sementara itu, pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “ Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-undang yang diturunkan dari amanat pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah Undang-undang Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi : “ Melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”.
  4. Perincian tentang diferensi fungsi (kewenangan) demikian, diarahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensi fungsi dimaksud pada pokok nya telah diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat pula Undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh pasal 24 ayat (3) UUD 1945, antara lain:
    - a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
    - b. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
    - c. Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK
    - d. UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TIPIKOR, dan lain-lain.
  5. Berdasarkan uraian diatas telah ternyata bahwa pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/102/III/2005 yang menentukan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan berdasar pada ketentuan Pasal 26, Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa Berdasarkan Keputusan jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak

---

<sup>60</sup> Dwi puji. 2000, *Pelaksanaan peranan jaksa dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra, Sumatra.

repository.ub.ac.id

Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

## E. IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

### **b.1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang”.

Undang-Undang RI No. 8 / 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi : “ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI”.

Dalam pasal 2 berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Dijelaskan bahwa Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.

Berdasarkan PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP Pasal 2 ayat (2) Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut: <sup>61</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat peyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

---

<sup>61</sup> M.yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hal 111



Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), pada daerah terpencil, terdapat keterbatasan tenaga Polri dengan pangkat tertentu untuk diangkat menjadi penyidik. Pasal 10 KUHP menyatakan pejabat polisi dapat diangkat sebagai penyidik pembantu, dengan syarat kepangkatannya sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur uda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan asing-masing.

Dalam pasal 7 berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang “:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi kepolisian selain diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga diatur mengenai kewenangan penyidikan pasal 13 sampai dengan 16 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Sebagaimana diketahui fungsi kepolisian terdiri dari tugas-tugas yang berada pada tataran tugas pencegahan.

Dalam setiap proses Penyidikan, Penyidik selalu berpedoman pada asas yaitu:<sup>62</sup>

- a. Asas Pemerataan di muka Umum/Persamaan Hak dalam hukum (Equality before the Law) adalah Penyidik memperlakukan setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana tidak diskriminatif dimana semua mempunyai hak yang sama

---

<sup>62</sup> Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi (online)*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820> (25 November 2011). *Op.Cit.*

- b. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of innocence) adalah semua orang yang ditangkap, diperiksa maupun ditahan tetap dianggap belum bersalah sebelum adanya kekuatan hukum tetap/putusan pengadilan atas dirinya.

Di samping kewenangan Kepolisian sebagai Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur menurut undang-undang yang berlaku bagi penyidik Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan serta mengikuti Hukum Acara Pidana yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai kewajiban sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
- b. Menegakkan sumpah jabatan sebagai aparat penegak hukum
- c. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- d. Memeberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan sanksi
- e. Membuat dan menyusun laporan serta menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, KPK tentang tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Penyidik POLRI.

Penegasan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sesuai poin ke 10 Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk:

- d. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- e. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI dalam rangka penegakan hukum;
- f. Meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan RI dan analisa transaksi keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengambilan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi dua tindakan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh kepolisian asal substansi pasal 11 Undang-undang N0 30 Tahun

---

<sup>63</sup> Ibid, Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi (online)*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820>. (25 November 2011)



2002 Tentang komisi pemberantas korupsi (KPK) tidak dilanggar. Kepolisian memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi jika (a) tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara; (b) perkara korupsi tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; (c) tidak menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>64</sup>

## **b.2. Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 26 :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa : “Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2002.

“ Dengan berlakunya Undang-undang ini pasal 27 Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( Lembaran Negara RI Nomor tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku”.

Pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :

---

<sup>64</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 165-166.

“Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Jaksa Agung mempunyai kewenangan sebagai koordinasi dan pengendalian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bersama orang-orang yang tunduk terhadap peradilan umum dan peradilan militer.

Berdasarkan Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 1 menentukan:

“ Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran”.

Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 89 ayat (1).

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP, berbunyi :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Yang dimaksud dalam ketentuan pasal diatas setelah dua tahun berlaku semua perkara terhadap Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan khusus acara pidana sampai ada perubahan, yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Korupsi ( No 31/99 jo 20/21)



Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan :

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dengan berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 KUHAP, maka kejaksan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP jo pasal 17 PP No 27 Tahun 1983 jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.<sup>65</sup>

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan : “ Di bidang pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan berdasarkan pada asas :<sup>66</sup>

- a. Asas Legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Asas Oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

---

<sup>65</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit*, Hal.41.

<sup>66</sup> Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi (online)*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820> (25 November 2011). *Op.Cit*.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu point dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk : <sup>67</sup>

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007 mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.



---

<sup>67</sup> Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi



**Tabel 1 Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

NO	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN
1.	UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 26.	UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 dan 39.
2.	UU RI No. 8 / 1981 tentang KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf a	Pasal 284 ayat (2) KUHAP (Peralihan).
3.	Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Sebagaimana diketahui fungsi kepolisian terdiri dari tugas yang diatur Pada pasal 13-16.	Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang–undang hukum acara pidana.
4.	Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sesuai poin ke 10 Presiden menginstruksikan kepada Kapolri	Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5.	Pasal 11 Undang-undang NO 30 Tahun 2002 Tentang KPK	Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Menginstruksikan kepada Jaksa Agung .
6.		Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-V/2007.
7.		Keputusan jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Sumber : Bahan Sekunder, diolah 2011

#### F. PERBANDINGAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Tabel 2 Perbandingan Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga	UU No 31/99 jo No 20/21	UU No 8/81	UU No 2/2002	UU No 16/2004
Kepolisian	Pasal 26	Pasal 6 ayat (1) huruf a	Pasal 13-16	-
Kejaksaan	Pasal 26 dan pasal 39	Pasal 284 ayat(2) dan PP 27 tahun 1983 Pasal 17	-	Pasal 30 ayat (1) huruf d

Sumber : Bahan Sekunder, diolah 2011

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat Perbandingan Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dapat disimpulkan ada empat indikator yang dapat dijadikan perbandingan antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan Peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Korupsi sehingga terdapat persamaan dan perbedaan.

1. Terdapat Persamaan Pada Unsang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, namun pihak Kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Jaksa Agung dalam ranah Peradilan Militer dalam Pasal 39 : “Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Pada Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang sedangkan pada Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, pada pasal 14 huruf g mengenai kewenangan penyidikan.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal yang sama mengenai dua lembaga yang mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana khusus, apabila menemukan hal seperti ini, maka dapat digunakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex posteriore derogat lex priori*, Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa, apabila ada 2 buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah



repository.ub.ac.id

ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain.<sup>68</sup>

Yang dimaksud undang-undang kemudian/baru adalah undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengenyampingkan Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, sehingga seharusnya yang melakukan penyidikan tindak pidana khusus adalah Kejaksaan berdasarkan asas ini. Akan tetapi dalam undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah menunjuk kembali pada undang-undang khususnya yaitu Undang-undang No 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dalam undang-undang tindak pidana korupsi menunjuk pada hukum acara pidana yaitu KUHAP, sehingga tidak lepas dari semua itu KUHAP lah yang dipakai. Didalam KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah POLRI dan penuntut umum adalah Jaksa.

2. Sedangkan perbedaannya yang pertama, Pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Kepolisian mempunyai kewenangan penyidikan diatur dalam pasal 26 :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang”.

Sedangkan Kejaksaan mempunyai kewenangan penuntutan yang diatur dalam UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 26 : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang”.

Kedua, Pada UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi : “ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI”. Sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan pada pasal 284 ayat (2) :

---

<sup>68</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Op.Cit.* hal 9.

“ Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana contohnya Undang-Undang 31/99 Jo 20/21001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan :

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Perbedaan ketiga, pada Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, pada pasal 13 sampai pasal 16 diatur mengenai tugas dan kewenangannya.

Perbedaan keempat, pada Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang.

3. Karakteristik pada undang-undang No 31 tahun 1999 jo undnag-undang No 20 Tahun 2001, mengamanatkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai lembaga yang independen, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta mengamanatkan kepada lembaga Kejaksaan yang merupakan penuntut umum sekaligus sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang dan lembaga Kepolisian sebagai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.

Pada Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengamaatkan Polisi berwenang sebagai penyidik selain itu melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Pada Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam penanganan Tindak pidana korupsi mengamanatkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan sebagai penyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dari peraturan perundang-undangan No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur hal yang sama yaitu lembaga tersebut mempunyai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana khusus, tindak pidana khusus dalam penulisan ini dimaksudkan tindak pidana korupsi, dalam asas peraturan perundangan telah dijelaskan apabila menemui hal seperti ini. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa, apabila ada 2 buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain ( *Lex posteriore derogat lex priori*). Dan Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan.<sup>69</sup> Ini justru menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum terhadap korupsi serta adanya ketegasan dan kejelasan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut yang memenuhi asas-asas perundangan baik berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan lagi.<sup>70</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka setidaknya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>70</sup> Artidjo Alkostar, *Op.Cit.* Hal 95.

lingkup peraturan.<sup>71</sup> Apabila indikator-indikator tersebut dipenuhi maka derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, sehingga mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditaati, hal itu tersebut berlaku sebaliknya.

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya *Law And Society*, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yang dikenal dengan teori efektifitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah:

1. Substansi hukum

Yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2. Struktur hukum

Yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, perbuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Kultur hukum

Kultur hukum ini layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenal hukum, oleh karena dalam kultur mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan system hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, ketiga faktor yang dikemukakan oleh Friedman tersebut diatas, perlu ditambahkan satu faktor lagi yaitu sarana /fasilitas.<sup>72</sup> Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>73</sup> Faktor hukumnya Yaitu berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal 14.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997, hal 14.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 8



- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Karena masih belum jelas tujuan dan belum mencerminkan ketetapan dan kepastian hukum.

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>74</sup>

Dan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.<sup>75</sup>

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti dikemukakan dan dirumuskan juga dalam Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5:

“ Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan keasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan”.

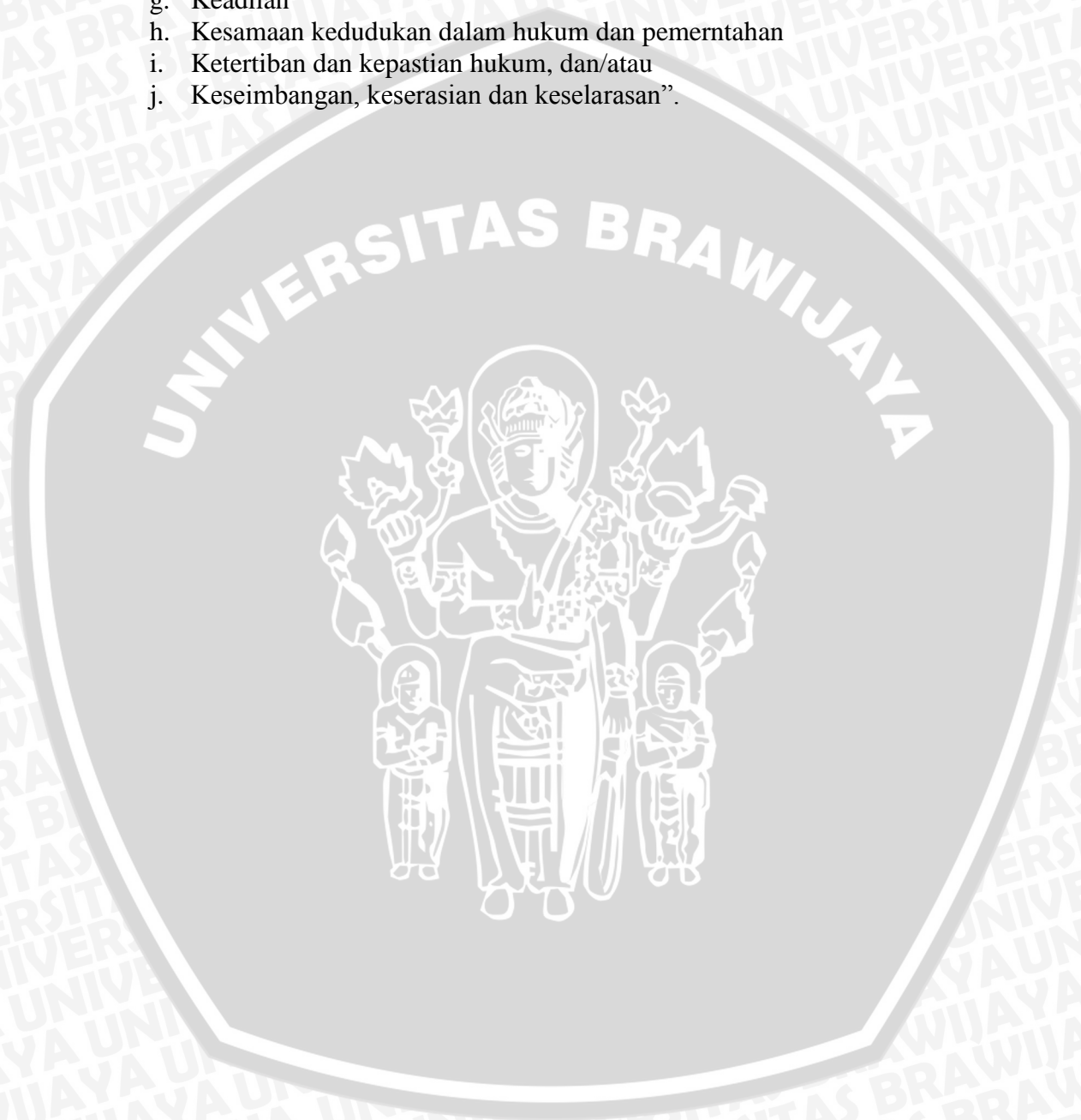
Pasal 6 ayat (1) ;

---

<sup>74</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal 257.

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantara
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.



<sup>75</sup> Ibid, hal 261.



## BAB V

### PENUTUP

#### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada Polisi dan Jaksa normanya tidak tegas, Adapun gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
  - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
  - c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
  - d. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa, apabila ada 2 buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (*Lex posteriore derogat lek priori*).
2. Wewenang Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai penyidik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam hal mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), undang 64 No 2 tahun 2002 tentang Polri, Inpres no 5 tahun 2004 tentang percepatan pember: rupsi sedangkan Jaksa bertindak sebagai penuntut umum, serta penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan pasal 30 ayat

(1) huruf d Undang-undang Kejaksaan RI dan Inpres No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

#### **D. SARAN**

1. - Diperlukannya upaya pembaharuan untuk sinkronisasi antara Peraturan perundang-undangan No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Peraturan perundang-undangan No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Hendaknya dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar efektif dan efisien sehingga tidak terjadi ketidaktegasan dan kebingungan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Seharusnya masing-masing lembaga baik itu Kepolisian atau Kejaksaan memahami kinerjanya masing-masing baik itu tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan undang-undang yang mengatur untuk mendukung dan saling membantu keberhasilan penyidikan tindak pidana korupsi serta memaksimalkan semua lembaga penegak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Acara Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, UII Press, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi puji. 2000, *Pelaksanaan Peranan Jaksa Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra, Sumatra.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008, *Pedoman Penulisan*, Malang.
- Jenti Oktavia Simanjutak, 2000, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Serta kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Laden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI, 1994, *Sistem Administrasi Negara RI*, Haji Masagung, Jakarta.

Mahfud M.D, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Moh Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Jakarta.

Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Masruchin ruba'I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UMPress, Malang.

M.yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukhtie Fadjar, 2007, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Pedoman penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Nurdaya Sakti, 2007, *korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*, makalah disajikan dalam perkuliahan kapita selekta hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Obor Indonesia, Jakarta.

Sajipto Raharjo, 1997, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta.

Selamat Sabagariang, 2008, *Dilema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Forum Hukum Akademika, Jambi.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Umbara, Bandung.



repository.ub.ac.id

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soren Davidsen, et all, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat nasional*, USINDO, Jakarta.

Kementrian Kesehatan, Kamis 17 November 2011, *Polisi dan Kejaksaan Sidik Kasus yang Sama*, Kompas.

#### **Perundang-undangan:**

Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, 2004, citra umbara, Bandung.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang *Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999*, 2004, citra umbara, Bandung.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2004, Citra Umbara, Bandung.

*Undang-undang RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, 2004, Citra Umbara, Bandung.

*Undang-undang RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI*, 2010, Citra Umbara, Bandung.

Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



**Internet :**

Anonymous, 2011, *Jaksa Sidik Korupsi Tak Bertentangan UUD 1945*, (online), <http://www.PolitikIndonesia.com>

Anonymous, 2011, *Korupsi Rp 332,84 M di Polda dan Kejati Misterius* (online), <http://mbayuisa.blogspot.com/2011/04/korupsi-rp-33284-m-di-polda-dan-kejati.html>.

Anonymous, 2011, *kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi* (online), <http://www.facebook.com/topic.php?uid=108352485996&topic=11820>.

Kamus besar, 2011, *Deskripsi dari Problematika Hukum*, (online), <http://www.kamusbesar.com/20593/komparatif> (26 Oktober 2011).

Kejaksaan RI, *Pengertian Kejaksaan* (online), <http://www.kejaksaan.go.id> (25 November 2011).

Kepolisian Negara RI, *Pengertian Kepolisian* (online), <http://www.polri.go.id/> telah diakses sebanyak 3213010 kali (25 November 2011)





# LAMPIRAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WAHYUNING THYAS ANDAYANI

Nim : 081011065

Menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data/bahan orang lain yang telah dipublikasi, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar ke sarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan ataupun dalam rangka memperoleh gelar ke sarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelarkesarjanaan saya.

Malang, 20 Februari 2012



WAHYUNING THYAS ANDAYANI

NIM. 0810110065





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

## SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 6232/UN.10.1/AK/2011

342/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 9 November 2011 dengan ini menetapkan :

Nama : Dr. Sumiyanto, SH.,MH.  
(Pembimbing Utama)

Nama : Bambang Sudjito, SH.,MHum.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

Nama : Wahyuning Thyas Andayani

No. Pokok Mhsw. : 0810110065

Program : Strata satu (S-1) Reguler

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : "STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.*

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 11 NOV 2011

Dekan,



DR. SIHABUDIN, SH.MH.  
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145  
Telp. (0341) 553898 - 5516111 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 5995005

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. SUMIYANTO SH, MH  
Nama Dosen Pendamping : BAMBANG SUDISTO SH, MH  
SK. Dekan : No. 16A/SK-FH/1995  
Tgl. 20 Mei 1995

Nama Mahasiswa : WAHYUNING TH  
No. Induk : 0810110065  
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA KEJARAN DALAM TINDAK PIDANA  
Bimbingan mulai : 24 - 11 - 2011  
Bimbingan selesai : 26 - 1 - 2012

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
24 - 11 - 2011	Bab 1-3 - Revisi Latar belakang menambahkan kasus - Definisi Konseptual di tambahan "Perbandingan" - Rumusan masalah di Perlekas - memperbaiki EYD - nya - Penulisan sesuai dg pedoman	31-12-2011 Bab 1-3 : - Latar belakang ditambah kasus sesuai dg pedoman Salahan. 19-1-2012 Bab 1-4 : - Bab 4 bagian pulako di tawar - latar belakang menyesuaikan dg isinya - materinya di perbaiki	
31-01-2012	Bab 1-5 - memperbaiki EYD-nya - Perbaiki daftar Pustaka format - melengkapi Lembar Persetujuan, daftar isi, abstrak.	26-1-2012 Bab 1-5 : - Bab II masih kurang sistematis penulisan nya - Bab II di tambah pendekatan komparatif - Bab II di Perlekas dan Fokus - Bab E Perbaiki Saran + Kesimpulan	

Mengetahui  
Ketua Bagian **HUKUM PIDANA**

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 6 - 2 - 2012  
Dosen Pembimbing I

Dr. Sumiyanto SH, MH  
NIP. 19590406 198001 2 001

Bambang Sudisto SH, MH  
NIP. 19520608 198003 1 006

Dr. Sumiyanto SH, MH  
NIP. 19521215 198003





**Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983  
Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum  
Acara Pidana**

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 27 TAHUN 1983 (27/1983)  
Tanggal : 1 AGUSTUS 1983 (JAKARTA)  
Sumber : LN 1983/36; TLN NO. 3258

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan;
3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
4. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
5. Menteri adalah Menteri Kehakiman.

## BAB II SYARAT KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN PENYIDIK

### Pasal 2

- (1) Penyidik adalah :
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) Penyidik pembantu adalah :
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III PAKAIAN ATRIBUT DAN PERANGKAT KELENGKAPAN PERSIDANGAN

### Pasal 4

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasehat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam.

- (3) Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef.
- (4) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam.
- (5) Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (6) Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan penuntut umum memakai atribut.
- (7) Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai pakaian dan atribut dalam sidang bagi hakim agung dan panitera pada Mahkamah Agung, diatur tersendiri oleh Mahkamah Agung.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak.

### BAB IV GANTI KERUGIAN

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.



#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

## BAB V REHABILITASI

### Pasal 12

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

### Pasal 13

- (1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :  
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :  
"Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

### Pasal 15

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.



## BAB VI PRAPERADILAN PADA KONEKSITAS

### Pasal 16

Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.

## BAB VII PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU

### Pasal 17

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII RUMAH TAHANAN NEGARA

### Pasal 18

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk RUTAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari RUTAN.
- (3) Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

### Pasal 19

- (1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

- (2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (5) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
- (6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- (7) Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- (8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
- (9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

#### Pasal 20

- (1) Izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh Kepala RUTAN.



- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

#### Pasal 21

- (1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab juridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN.
- (4) Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 22

- (1) RUTAN dipimpin oleh Kepala RUTAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUTAN dibantu oleh Wakil Kepala.

#### Pasal 23

- (1) Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Kepala RUTAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai tahanan yang di bawah pengawasannya.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 24

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUTAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat dan pegawai RUTAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUTAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

### BAB IX RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

#### Pasal 26

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai



surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- (3) Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

#### Pasal 29

Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.

#### Pasal 31

- (1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala

#### Pasal 32

- (1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
- (2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 34

- (1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

### BAB X JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN

#### Pasal 35

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.



#### Pasal 36

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Sebelum penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penyidik dan penyidik pembantu yang ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pengangkatan sebelumnya.
- (2) Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan dan kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 38

- (1) Sebelum terbentuknya RUTAN berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.
- (2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Kepala cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang daerah hukumnya meliputi cabang RUTAN tersebut.

Pasal 39

- (1) Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasar Peraturan Pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.
- (2) Pengelolaan dan biaya penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1983  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

I. UMUM

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHPA tercantum ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya, misalnya :

- a. Pasal 6 ayat (1) yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang penyidikan;
- b. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai penyidik pembantu;
- c. Pasal 231 ayat (1) mengenai jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sidang bagi hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum.

Selain pelaksanaan ketentuan tersebut di atas yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah ada pula yang perlu diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 231 ayat (2) yaitu mengenai tata tertib persidangan.

Dalam KUHPA tercantum beberapa pasal yang merupakan materi baru, antara lain mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, yang tercantum dalam BAB XII, rumah tahanan negara (RUTAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Sebagai materi baru perlu diatur pelaksanaannya, misalnya mengenai ganti kerugian, kapan dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, batas jumlahnya, dan siapa yang membayar. Demikian pula dalam rehabilitasi diatur mengenai jangka waktu mengajukan rehabilitasi dan cara mengajukan permintaan rehabilitasi.

Sehubungan dengan diaturnya tindak pidana koneksitas, dalam BAB XI KUHPA maka diatur ketentuan mengenai praperadilan dalam perkara koneksitas.

Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 maka dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ada pengaturan mengenai hal ini. Dalam BAB RUTAN diatur mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat RUTAN dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan.

Dalam BAB RUPBASAN diatur hal-hal mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta pejabat yang bertanggung jawab atas

benda-benda sitaan dan barang yang dirampas untuk negara, baik secara juridis maupun secara fisik.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam BAB tersendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1), (2), (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan penunjukan termasuk kewenangan untuk pembebasan.

Ayat (5)

Usul Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil oleh Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna kepentingan pembuatan rekomendasi.

Ayat (6)

Kewenangan termasuk kewenangan pemberhentian.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (6) dan (7)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.



#### Pasal 6

Dengan menggunakan pakaian tidak resmi, akan menimbulkan suasana kekeluargaan dan akan memberi pengaruh yang baik bagi anak sebagai terdakwa.

#### Pasal 7

Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Dalam hal permohonan rehabilitasi diajukan oleh keluarga atau kuasanya, maka pemulihan hak itu untuk yang dimohonkan.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cabang RUTAN bertempat kedudukan di dalam wilayah kecamatan.

Ayat (3)

Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat tahanan untuk pria dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing dipisahkan satu sama lain.

Tempat tahanan anak perlu dipisahkan dari orang dewasa, agar jangan sampai anak tersebut mendapat pengaruh yang kurang baik.

Untuk memudahkan administrasi dan pengawasan, selain pemisahan tahanan berdasar jenis kelamin dan umur, diadakan pula pemisahan berdasarkan tingkat pemeriksaan.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Pengeluaran tahanan oleh pejabat yang berwenang menahan, namun apabila sampai pada waktunya masa tahanan habis, belum ada perintah perpanjangan atau perintah pengeluaran, pejabat RUTAN berwenang mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum.  
Untuk menghindarkan masalah tersebut, maka paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan habis Kepala RUTAN memperingatkan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis tentang hampir habisnya masa tahanan tersebut.

Ayat (8)  
Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu dalam ayat ini adalah :

- Apabila tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan dan/atau pemeriksaan dokter di luar RUTAN, maka selain harus memenuhi ketentuan ayat ini, harus pula disertai keterangan dokter RUTAN yang ditunjuk oleh Menteri.
- Pulang ke rumah keluarganya, karena keluarga sakit keras, kematian anak, isteri, orang tua dan sebagainya yang menurut pertimbangan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dapat disetujui.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 22

Pasal 23

Ayat (1)  
Kepala RUTAN bertanggung jawab atas pengawasan tahanan yang menyangkut kesejahteraan tahanan dan pengawasan atas keamanan dari tahanan, jika diperlukan minta bantuan dari kepolisian.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas. Pasal 25  
Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Batang atau benda yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam RUPBASAN adalah seperti, antara lain kapal laut.

Ayat (3) dan (4)  
Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 28

Cukup jelas. Pasal 29

Cukup jelas. Pasal 30



Cukup jelas. Pasal 31  
Cukup jelas. Pasal 32  
Cukup jelas. Pasal 33  
Cukup jelas. Pasal 34

#### Pasal 35

Ayat (1)  
Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.  
Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

Cukup jelas. Pasal 37

#### Pasal 38

Ayat (1)  
Pembentukan RUTAN akan dilakukan secara berangsur-angsur. Sebelum terbentuknya RUTAN berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri Kehakiman menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  6. Para Gubernur;
  7. Para Bupati dan Walikota.
- Untuk PERTAMA :
- Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEDUA :
- Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
- KETIGA :
- Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
- KEEMPAT :
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
- KELIMA :
- Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.



- KEENAM** : Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH** : Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.
- KEDELAPAN** : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
- KESEMBILAN** : Melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- KESEPULUH** : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparaturnya untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
- KESEBELAS** : Khusus kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
  2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.
  3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta komisi Pemberantasan Korupsi.
  4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
    - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
    - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.



- c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
  - d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
  - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
  - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
9. Jaksa Agung Republik Indonesia
  - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
  - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
  - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
  - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
  - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan  
Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan  
hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat  
tindak pidana korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik  
dilingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan  
liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi  
kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUABELAS : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh  
tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan

ttd

Lambock V Nahattands